

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TERHADAP
PENGAJUAN IZIN POLIGAMI SEBELUM HABIS MASA IDDAH BEKAS ISTRI**

SKRIPSI

Oleh :

Nurul Fadilah

NIM : C91215147



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PRODI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nurul Fadilah
NIM : C91215147
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : PANDANGAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA SURABAYA TERHADAP
PENGAJUAN IZIN POLIGAMI SEBELUM
HABIS MASA IDDAH BEKAS ISTRI

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Januari 2019



nyatakan,

Nurul Fadilah

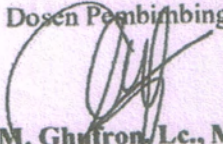
C91215147

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Nurul Fadilah Nim C91215147 ini telah dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 09 Januari 2019

Dosen Pembimbing,

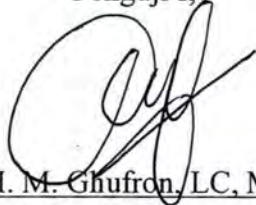

H. M. Ghafiron, Lc., M.HI.
NIP. 197602242001121003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Fadilah NIM. C91215147 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I,



H. M. Ghufron, LC, MHI.

NIP. 197602242001121003

Penguji II,



Dr. Nurlailatul Musyafaah, LC, M.Ag

NIP. 197904162006042002

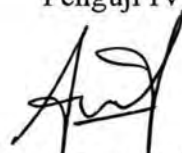
Penguji III,



Saoki, MHI

NIP. 197404042007102005

Penguji IV,



Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.

NIP. 198905172015031006

Surabaya, 27 Januari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag:

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Fadilah
NIM : C91215147
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : delafadilah61@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TERHADAP
PENGAJUAN IZIN POLIGAMI SEBELUM HABIS MASA IDDAH BEKAS ISTRI

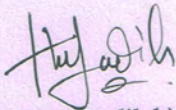
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Februari 2019

Penulis


(Nurul Fadilah)

dari satu diberikan pembatasan.¹³ Persamaan dalam penelitian di atas dengan yang penulis kaji yaitu sama-sama mencantumkan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perbedaannya yaitu dalam penelitian di atas tidak menjelaskan mengenai permohonan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri.

Kedua, skripsi tentang “Analisis *Maslahah* Terhadap Ketentuan Poligami Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983”. Di susun oleh Khoirul Aminudin (Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo). Skripsi ini membahas tentang analisis *maslahah* terhadap aturan poligami bagi pegawai negeri sipil dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983.¹⁴ Dalam penelitian di atas dengan penelitian yang penulis kaji yaitu sama-sama menggunakan peraturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perbedaannya yaitu pada penelitian di atas mengkaji tentang *maslahah* terhadap aturan poligami bagi pegawai negeri sipil, sedangkan penulis mengkaji tentang pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Anwar Khoiri (Mahasiswa STAIN Ponorogo), dengan judul “Poligami *Komparasi Terhadap Pemikiran Yusuf*

¹³ Nurfaidah, *Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* : (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017)

¹⁴ Khoirul Aminudin, *Analisis Maslahah Terhadap Ketentuan Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983* : (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).

- b. Data tentang analisis yuridis pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri.

2. Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²¹

Data primer ini berupa :

- 1. Hasil wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Surabaya kepada bapak Drs. Agus Suntono, M.H.I dan Drs. H. Bahrul Hayat S.H.

- 2. Surat edaran No. DIV/ED/17/1979 yang di keluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut.²² Adapun sumber sekunder yang dijadikan rujukan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Wawancara terhadap Kepala Kantor KUA di Tenggilis Mejoyo, bapak Drs. H. M. Hasan Baisuni, M.Si,
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

²¹ Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), 51.

²² Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penulisan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 133.

BAB II

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG

A. Tinjauan Umum dan Persetujuan Izin Poligami

1. Pengertian, Dasar Hukum, dan Syarat Poligami

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *poli* atau *polos* artinya banyak, dan kata *gamen* atau *gamos* artinya kawin atau perkawinan.²⁷ Jadi “poligami” dapat diartikan sebagai “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”.²⁸

Menurut Undang-undang poligami ialah mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang sama. Berpoligami atau menjalankan (melakukan) poligami sama dengan poligami yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama.

a. Poligami Perspektif Undang-Undang

Menurut Undang-undang poligami ialah mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang sama. Berpoligami atau menjalankan (melakukan) poligami sama dengan poligini yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama.

²⁷ Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), 84.

²⁸ C.S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, tt), 211.

b. Talak *Bid'iy*

Talak *bid'iy*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk talak yang disepakati ulama termasuk dalam kategori talak *bid'iy* itu ialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini disebut *bid'iy* karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan talak pada waktu istri dapat langsung memulai iddahya.³⁶ Hukum talak *bid'iy* adalah haram dengan alasan memberi mudharat kepada istri, karena memperpanjang masa iddahya.

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah ketentuan talak *raj'i* yaitu talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa iddah, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.³⁷ Hal senada dikemukakan juga oleh Ibnu Rusyd bahwa talak *raj'i* adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk istri.³⁸ Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir bahwa talak *raj'i* adalah talak yang masih memungkinkan suami rujuk kepada bekas istrinya tanpa nikah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa talak *raj'i* adalah talak dimana suami diberi

³⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 161.

³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Madzhab", (Jakarta Lentera, 2001), 451.

³⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dār Al-Jiil, 1409 H/1989), 45

hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah.³⁹

Dalam Al-qur'an dalam surat Al-baqarah ayat 229 diungkapkan bahwa talak *raj'i* adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri di mana suami boleh rujuk kepada istri. Ikhtilaf yang terjadi dikalangan ulama tentang hak merujuk dalam talak *raj'i* ini disertakan juga keharusan istri menerima rujuk suami.

Menurut Imam al-Syafi'i, bila seorang laki-laki berkata pada istrinya yang sedang dalam masa iddah "saya telah merujukmu hari ini atau besok atau sebelumnya" di dalam masa iddah, lalu wanita mengingkarinya maka diterima adalah perkataan laki-laki. Bila laki-laki ingin merujuknya dalam iddah maka laki-laki itu memberi tahu bahwa ia telah melakukannya kemarin, dan kalau laki-laki berkata sesudah selesai iddah: "saya telah merujukmu di dalam iddah" lalu wanita itu mengingkari maka yang diterima adalah perkataan wanita dan laki-laki harus mendatangkan bukti bahwa ia merujuknya di masa iddah.⁴⁰

Hak merujuk suami terhadap istrinya yang di talak *raj'i*, diatur berdasarkan firman Allah dalam Al-qur'an surat Al-baqarah ayat 228 yang menjelaskan, memberi hak kepada bekas suami untuk merujuk bekas istrinya yang ditalak *raj'i* dengan batasan bahwa bekas suami itu dengan maksud baik dan untuk mengadakan perbaikan. Tidak dibenarkan bekas suami

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 80.

⁴⁰ Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *Al Umm*, Juz. V, (Dār al-Fikr, tt), 263.

Dipaparkan dalam kitab Al Umm dijelaskan bahwa rujuk adalah hak suami atas istrinya dan ia tidak boleh menolak suami untuk merujuknya.⁴¹ Ketentuan tersebut berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) permasalahan rujuk dalam KHI diungkapkan pada buku pertama tentang hukum perkawinan dan secara khusus diatur dalam bab XVIII Pasal 163-169, disamping itu istilah rujuk juga ditemukan dalam beberapa bab lain, yaitu bab II Pasal 10 bab XVI Pasal 118 dan XVII Pasal 150.

Menurut KHI, seorang suami yang akan melakukan rujuk terhadap mantan istrinya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari mantan istrinya. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 167 ayat 2, “Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah”. Bahkan dalam hal mengatur persoalan ini, KHI lebih tegas lagi, yaitu jika rujuk yang dilakukan dengan memaksakan diri oleh suami, sedangkan istrinya tidak menghendaki rujuk tersebut, maka rujuk yang ditolak itu dapat dinyatakan tidak sah dengan persetujuan Putusan Pengadilan Agama.⁴² Hal ini diatur dalam Pasal 164 dan 165 KHI yang berbunyi:

Pasal 164: “Seorang wanita dalam iddah talak *raj’i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.”

⁴¹ Al-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz V, (Dār al-Fikr), 260.

⁴² Menara Tebuireng, *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, dalam M. Chamim Supaat (eds.), *Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*, (Jombang, Vol. 1 No. 1 Tahun 1 September 2004), 35.

akan menikah lagi dengan wanita lain pada hakikatnya dari segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah beristri lebih dari seorang (poligami).⁴⁴

a. Pengertian Iddah

Iddah ialah sebuah kewajiban yang harus dijalani oleh istri setelah terjadi perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya dengan berpantang melakukan perkawinan baru ketentuan iddah tersebut terdapat dalam Al-qur'an dan Hadits. Jika kata iddah itu dihubungkan dengan kata *al-mar'ah* (perempuan) maka artinya hari-hari haid atau suci, hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan baik berdasarkan bulan, haid atau suci, atau melahirkan.⁴⁵

Pengertian iddah menurut istilah sebagaimana dijelaskan dalam ensiklopedia dalam ensiklopedia hukum Islam adalah masa menunggu wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.⁴⁶

Iddah wajib dilakukan apabila ikatan pernikahan putus akibat talak, baik setelah istri digauli atau setelah melakukan *khalwat*. Disamping itu, iddah juga harus dilakukan apabila suami meninggal dunia, baik istri telah digauli

⁴⁴ Surat edaran No. DIV/ED/17/1979 yang di keluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

⁴⁵ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqih Iddah; Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 74.

⁴⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 637.

Swt adalah adanya iddah bagi wanita setelah berpisah dengan suaminya, baik pisah karena mati atau karena talak.⁴⁹

Salah satu hikmah diperintangkannya iddah antara lain untuk mengetahui kosongnya rahim dari janin sehingga tidak terjadi percampuran nasab antara satu dengan yang lain.⁵⁰ Apabila terjadi percampuran mani, maka hal tersebut merupakan suatu sesuatu yang sangat berbahaya serta tidak dapat diterima oleh akal sehat.⁵¹

Hikmah iddah yang kedua, iddah memberikan kesempatan kepada suami istri untuk membangun rumah tangga kembali apabila melihat adanya kebaikan setelah terjadinya perceraian.⁵² Iddah akan memperpanjang masa kemungkinan rujuk. Bagi suami yang mentalak istrinya mendapat petunjuk dan menyesal atas talak yang dijatuhkan. Melalui iddah menjadikan adanya waktu yang cukup bagi suami istri untuk kemungkinan bisa kembali.

Hikmah iddah yang lain adalah iddah memperbesar penghormatan terhadap hak suami apabila berpisah karena meninggalnya suami sebagai ungkapan rasa berduka cita. Iddah mengisyaratkan keagungan sebuah pernikahan, sehingga harus berhati-hati terhadap hak suami yang baru.

⁴⁹ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr al-Fir, 1994), 54.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 622.

⁵¹ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, 54.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, 622.

Terdapat beberapa macam iddah yang harus dijalani oleh wanita yang berpisah dari suaminya, baik karena talak, meninggalnya suami atau karena fasakh. Dalam hal lamanya masa iddah, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hampir sama ketentuannya dengan kompilasi hukum Islam (KHI). Yakni 130 hari untuk perkawinan yang putus karena kematian, 90 hari bagi perkawinan yang putus karena perceraian, dan bagi perkawinan yang putus ketika si istri dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Ketentuan tersebut terdapat pada pasal 39 ayat 1-3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dan yang penulis kaji yaitu masa iddah karena talak yang ditetapkan masa iddah 90 hari bagi istri. hitungan gugatan cerai terdapat pada, pasal 81 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Undang-Undang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa, pada ayat (2) “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Berbeda lagi dengan hitungan talak *raj’i* yaitu terdapat pada pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan”. Jadi hitungan talak *raj’i* yaitu pada saat suami mengikrarkan talak didepan persidangan, pada saat itu juga akta cerai dikeluarkan. Dan sejak itulah masa iddah selama 3 bulan di mulai.

- Jawad, Mughniyah Muhammad. *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Jakarta Lentera, 2001.
- Khoiri, Anwar. *Poligami Komparasi Terhadap Pemikiran Yusuf Qordhawi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Ponorogo: Stain 2002.
- Lu'luul, Mukarromah. *Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Seorang Suami yang Berpoligami Tanpa Izin Istri Pertama :Studi Kasus di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, Surabaya*: UIN Sunan Ampel, 2017.
- M. Amrin, Tatang. *Menyusun Rencana Penulisan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 1995.
- Mansur, Kahar. *Membina Moral dan Akhlaq*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Muhammad, Uwaidah Kamil. *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa* , Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- M. Chamim, Supaat. *Kewenangan Istri Menolak Ruju' Dalam Perspektf Hukum Islam di Indonesia*, Jombang: 2004.
- Nurfaidah, *Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Makasar: UIN Alauddin, 2017.
- Nurul, Mahmudah. *Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Dalam Perizinan Perkara Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa Surat Izin Atasan*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015.

